

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nahdlatul Ulama (NU) sejak kelahirannya merupakan wadah perjuangan untuk menentang segala bentuk penjajahan dan merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang, sekaligus aktif melakukan dakwah-dakwahnya untuk senantiasa menjaga kesatuan negara Republik Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bagaimana Nahdlatul Ulama (NU) dalam peranannya yang begitu besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dilihat atas latar belakang lahirnya ormas terbesar di dunia Nahdlatul Ulama (NU). Paling tidak ada tiga alasan besar yang melatarbelakangi lahirnya Nahdlatul Ulama (NU) 31 Januari 1926, yaitu *Pertama*, motif agama. *Kedua*, motif mempertahankan paham *Ahlu al-Sunnah wal Jama'ah*, dan *ketiga*, motif nasionalisme. Menurut Anam (1998: 36) bahwa:

“Motif nasionalisme adalah diantara tiga motif lahirnya NU, diantaranya yaitu *Pertama*, Motif agama karena Nahdlatul Ulama lahir atas semangat menegakkan dan mempertahankan Agama Allah SWT di Nusantara, meneruskan perjuangan Walisongo. Terlebih Belanda-Portugal tidak hanya menjajah Nusantara, tapi juga menyebarkan agama Kristen-Katolik dengan sangat gencarnya. Mereka membawa para misionaris-misionaris Kristiani ke berbagai wilayah. *Kedua*, motif mempertahankan paham Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah, karena NU lahir untuk membentengi umat Islam khususnya di Indonesia agar tetap teguh pada ajaran Islam Ahlu al-sunnah wa al-Jamā'ah (Para Pengikut Sunnah Nabi, Sahabat dan Ulama Salaf Pengikut Nabi-Sahabat), sehingga tidak tergiur dengan ajaran-ajaran baru yang tidak dikenal pada zaman Rasul-Sahabat-Salafus Shaleh/ajaran ahli bid'ah yaitu pembawa ajaran-ajaran bid'ah yang sesat (bid'ah madzmumah)”.

Motif nasionalisme timbul karena NU lahir dengan niatan kuat untuk menyatukan para ulama dan tokoh-tokoh agama dalam melawan penjajahan. Semangat nasionalisme itu pun terlihat juga dari nama Nahdlatul Ulama itu sendiri yakni “Kebangkitan Para Ulama”. Nahdlatul Ulama (NU) pimpinan Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari yang sangat nasionalis. Sebelum Indonesia merdeka, para pemuda di berbagai daerah

mendirikan organisasi bersifat kedaerahan, seperti Jong Celebes, Pemuda Betawi, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan sebagainya, akan tetapi kiai-kiai NU justru mendirikan organisasi pemuda bersifat nasionalis. Pada tahun 1924 para pemuda pesantren mendirikan *Shubban al-Waṭān* (Pemuda Tanah Air). Organisasi pemuda itu kemudian menjadi *Ansor Nahdlatul Ulama* (ANO) yang salah satu tokohnya adalah Kiai Muhammad Yusuf Hasyim. Selain itu dari rahim Nahdlatul Ulama (NU) lahir laskar-laskar perjuangan fisik, di kalangan pemuda muncul laskar-laskar *Ḥizbullāh* (Tentara Allah) dengan panglimanya KH. Zainul Arifin seorang pemuda kelahiran Barus Sumatera Utara tahun 1909, dan di kalangan orang tua *Sabīlillāh* (Jalan menuju Allah) yang dikomandoi KH. Masykur, laskar-laskar NU di atas siap berjuang jihad menegakkan agama dan bangsa, mengusir para penjajah Belanda dan Jepang untuk merebut kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Hakim, dkk (2003: 97) bahwa:

“Perjuangan NU dalam melawan penjajah tidak hanya dalam masalah jihad, tetapi perjuangan NU juga menentang terhadap semua kebijakan politik yang tidak menguntungkan pribumi, ada beberapa kebijakan yang ditentang oleh NU atas ketidakadilan kolonial Belanda pada beberapa masalah, diantaranya: (1) Masalah Pendidikan; Belanda melakukan ketidakadilan dalam hal administrasi sekolah yang mengintimidasi terhadap eksistensi sekolah, pesantren, guru sekolah dan guru pesantren untuk tidak berkembang dan bahkan kalo bisa mati dengan sendirinya dengan cara melakukan regulasi pendidikan yang merugikan pada sekolah, pesantren dan gurunya (2) Masalah Peradilan Agama; Belanda membatasi gerak langkah peradilan agama untuk tidak mengurus masalah perdata Islam, dan wewenang tersebut dikembalikan pada sistem adat istiadat, hukum adat kembali diberlakukan di Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan, bukan semata-mata hukum adat yang menjadi soal, melainkan penggrogotan kekuasaan Peradilan Agama yang merupakan lambang wewenang kaum Muslimin sudah dirusak dan bahkan kalo perlu dimatikan. (3) Masalah Undang-Undang Perkawinan; Undangundang perkawinan diintervensi penuh oleh Kolonial Belanda, dan bahkan UU tentang perkawinan, keleluasaan mengutarakan kritik terhadap agama Islam dan meminta supaya pengetahuan keagamaan para pegawai yang ada didalamnya diawasi secara ketat dan diperlakukan tidak adil”.

Perjuangan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dengan upaya yang kuat menggerakkan para ulama, santri dan umatnya untuk bangkit menghimpun kekuatan

melawan pemerintahan asing yang dianggap kafir, merupakan bukti sejarah yang tidak dapat dipungkiri. Bahkan menurut hitungan rasional kemerdekaan negara Indonesia ini tidak akan pernah terwujud, mengingat rakyat Indonesia pada saat itu merupakan rakyat yang miskin, serba kekurangan, untuk makan saja masih sulit akibat kejamnya penjajahan, demikian juga minimnya persenjataan yang dimiliki oleh pasukan dan relawan pejuang rakyat kita, apabila dibandingkan dengan persenjataan yang dimiliki oleh penjajah Belanda. Akan tetapi berkat motivasi para ulama kita termasuknya adalah ulama NU yang berupaya mentransformasi gerakan-gerakan yang bersifat spontanitas kepada mekanik atau organik dari doa dan wirid-wirid yang diberikan oleh ulama-ulama NU (bisa berupa *asmā'*, *ḥizb*, *dzikir*, *ṣalawāt* dan lain sebagainya) menjadi sebuah sugesti besar pensakralan dan kekuatan besar untuk melawan peperangan melawan penjajah, maka dengan sugesti yang kuat ini perjuangan para ulama bisa menghantarkan ke sebuah kemerdekaan berkat rahmat Allah.

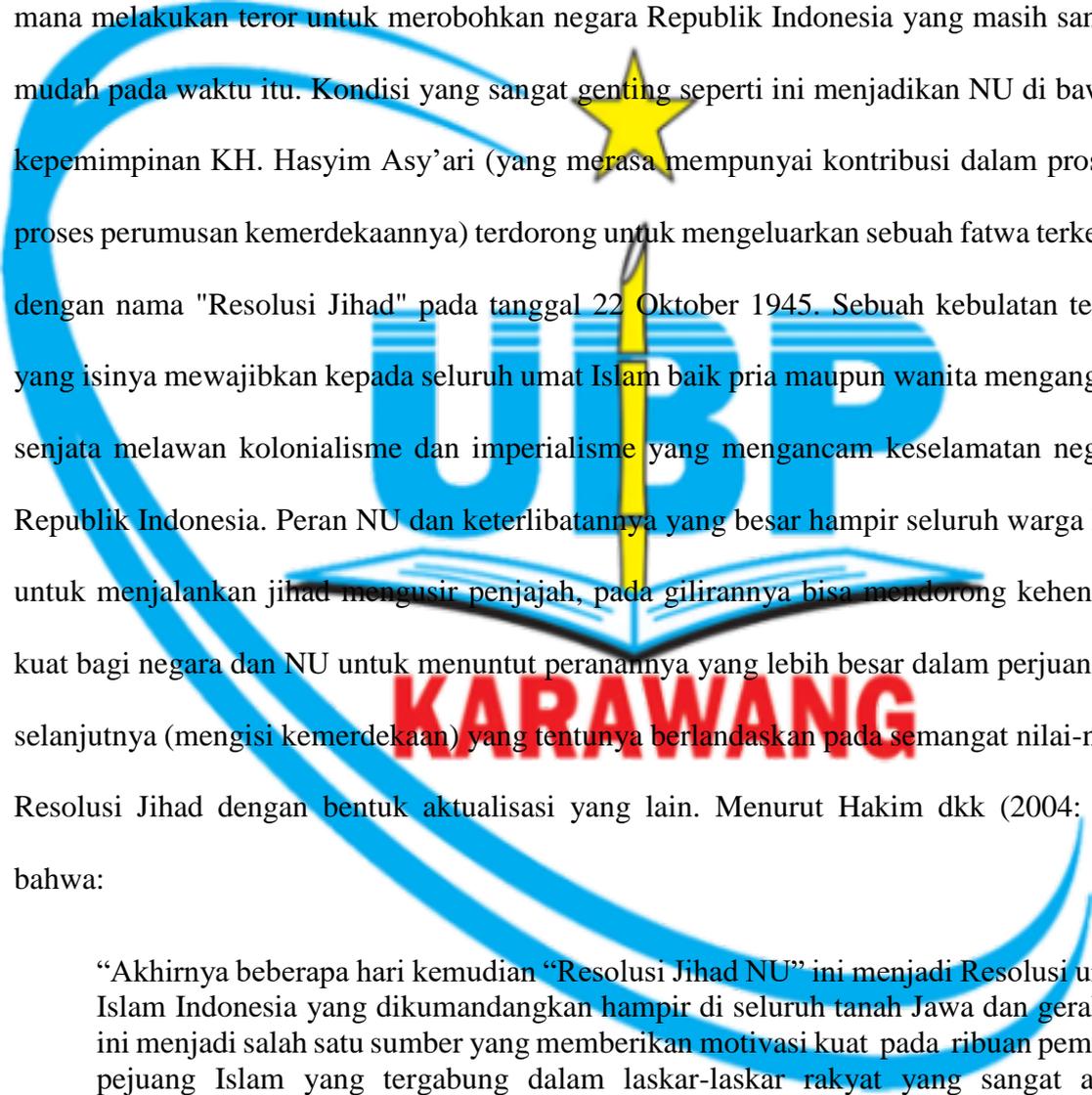
Umat Islam di bawah komando para ulama telah memberikan warna yang terang dalam sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan negara Indonesia, utamanya dalam perlawanan menentang penjajahan Belanda, merebut dan mempertahankan kemerdekaan pada masa revolusi fisik saat seluruh bangsa mempertaruhkan hidup dan mati untuk tetap tegaknya kemerdekaan Indonesia. Begitu mendalamnya torehan sejarah yang dipahat umat Islam sepanjang masa Imperialisme di bumi Nusantara ini, sehingga kemanapun kita mencoba melacak jejak perjuangan di masa penjajahan maka senantiasa pula akan kita temukan pijaran api semangat perjuangan Islam di mana-mana. Mempelajari tentang sejarah perjuangan perlawanan umat Islam Indonesia melawan penjajah Belanda, maka dalam perjalanannya akan kita temukan periode dimana bermunculan berbagai macam lembaga atau organisasi sosial dan keagamaan yang berjuang mewartakan kekuatan ummat sebagai salah satu potensi yang menopang untuk tegaknya kedaulatan negara. Perjuangan

umat Islam dan organisasi yang mewadahnya dapat dilihat mulai dari lahirnya SDI (Serikat Dagang Indonesia) tahun 1911 M yang kemudian pada tanggal 10 September 1912 menjadi wadah Serikat Islam (SI). Menurut Suryanegara (1985: 353-394) bahwa:

“Pada perkembangan selanjutnya, SI mendapat simpati umat Islam secara luas tidak hanya di Surakarta. Bergabungnya HOS. Tjokroaminoto (1882-1934) dalam SI menambah kekuatan dan menarik simpati massa. Tjokroaminoto yang kharismatik dan berani mengkritik penjajah menjadi daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki oleh organisasi pada masanya. Ditambah lagi kekuatan pimpinan SI tidak hanya ada pada diri Tjokroaminoto, melainkan juga ada pada diri H. Agoes Salim (1884-1954), Abdoel Moeis (1890-1959) dan Wignjadisastra. Dengan jajaran pimpinan yang kharismatik dan basis massa yang luas, SI semakin berani mengkritik penjajah dengan mengadakan National Congress Central Sarekat Islam yang pertama di gedung Concordia atau gedung Merdeka di Bandung pada 17-24 Juni 1916. Dalam kongres ini SI memelopori penggunaan istilah nasional dalam masyarakat luas, dan menuntut Indonesia merdeka dengan istilah pemerintahan sendiri atau Zelf Bestuur. Maka tak heran jika Kahin menyatakan bahwa Sarekat Islam merupakan gerakan politik pertama di Indonesia. Gerakan kebangkitannya sangatlah menakjubkan bagi umat Islam dan tentu menjadi ancaman berbahaya bagi penjajah Belanda”.

Kemudian muncullah organisasi Muhamadiyah tahun 1912, lalu disusul NU pada tahun 1926 di bawah pimpinan KH. Hasyim Asy'ari, dimana NU tampil sebagai pionir dan perintis kemerdekaan semenjak masa jauh sebelum Indonesia merdeka dan merekapun ikut menjadi bagian pendiri dari negara Republik Indonesia ini. Menurut Suryanegara (1996: 340-347) bahwa:

“Beberapa organisasi yang berdiri di awal abad ke-20 seperti SDI, SI, PERSIS dan Muhamadiyah lebih bercorak modernis dan bertujuan sebagai pemurnian akidah dan ibadah dari bid'ah khurafat dan takhayul. Gerak organisasi itu pun dipengaruhi oleh pemikiran Pan-Islamisme yang ada di Mesir. Maka, pada tahun 1926, dengan prakarsa KH. Hasyim Asy'ari, berdirilah Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926 di Surabaya. NU berdiri untuk mempertahankan dan menyebarkan pemahaman kaum tradisional yang masih banyak dianut oleh masyarakat pedesaan dan kalangan pesantren. Dengan akar historis yang kuat dan luas, NU tidak kalah cepat dalam menerima respon masyarakat bukan saja di Jawa, namun juga di Sumatera dan Kalimantan. Dengan pemahaman yang tradisional dan pengaruh pesantren yang kuat, NU bahkan menjadi organisasi terbesar dibandingkan Muhammadiyah dan PERSIS. Maka tak heran jika NU mampu mendirikan partai sendiri setelah sebelumnya terjadi pergeseran dalam tubuh Masyumi”.



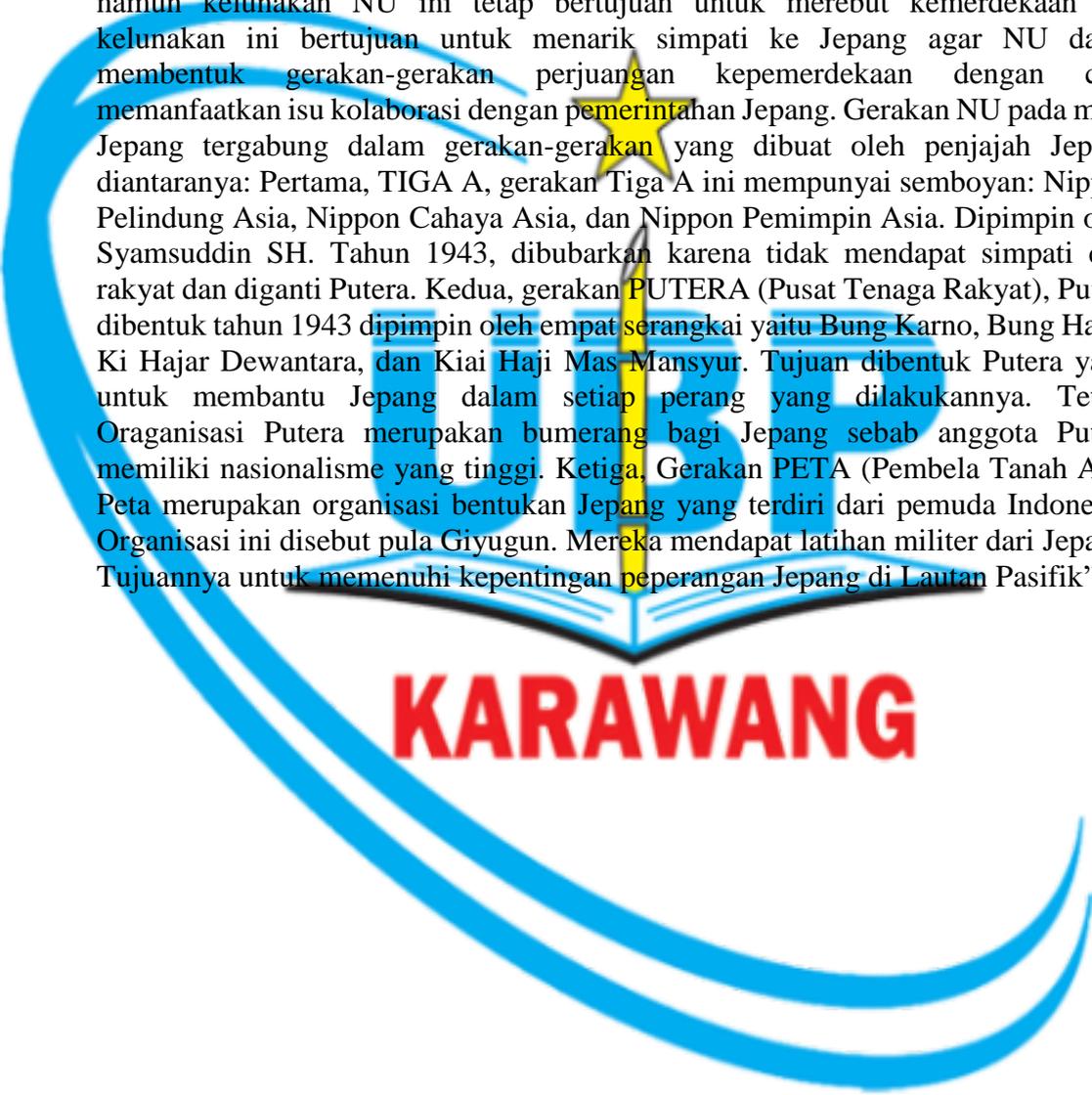
Pada masa penjajahan Jepang menguasai Indonesia, arena perjuangan NU justru semakin melebarkan sayapnya. Sikap anti penjajah yang memang sudah pembawaannya, menyebabkan antisipasi terhadap perkembangan keadaan yang menyangkut keselamatan negara semakin ditingkatkan, lebih-lebih lagi ketika kehadiran tentara sekutu dan Netherlands Indies Civile Administrastion (NICA) mendarat di Indonesia dan dimana-mana melakukan teror untuk merobohkan negara Republik Indonesia yang masih sangat mudah pada waktu itu. Kondisi yang sangat genting seperti ini menjadikan NU di bawah kepemimpinan KH. Hasyim Asy'ari (yang merasa mempunyai kontribusi dalam proses-proses perumusan kemerdekaannya) terdorong untuk mengeluarkan sebuah fatwa terkenal dengan nama "Resolusi Jihad" pada tanggal 22 Oktober 1945. Sebuah kebulatan tekad yang isinya mewajibkan kepada seluruh umat Islam baik pria maupun wanita mengangkat senjata melawan kolonialisme dan imperialisme yang mengancam keselamatan negara Republik Indonesia. Peran NU dan keterlibatannya yang besar hampir seluruh warga NU untuk menjalankan jihad mengusir penjajah, pada gilirannya bisa mendorong kehendak kuat bagi negara dan NU untuk menuntut perannya yang lebih besar dalam perjuangan selanjutnya (mengisi kemerdekaan) yang tentunya berlandaskan pada semangat nilai-nilai Resolusi Jihad dengan bentuk aktualisasi yang lain. Menurut Hakim dkk (2004: 53) bahwa:

“Akhirnya beberapa hari kemudian “Resolusi Jihad NU” ini menjadi Resolusi umat Islam Indonesia yang dikumandangkan hampir di seluruh tanah Jawa dan gerakan ini menjadi salah satu sumber yang memberikan motivasi kuat pada ribuan pemuda pejuang Islam yang tergabung dalam laskar-laskar rakyat yang sangat aktif melibatkan diri seperti dalam pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya, pertempuran Palagan Ambara, pertempuran lima hari di Semarang, Lautan Api dan pertempuran-pertempuran di Bandung lainnya yang tidak tercatat dalam sejarah”.

Arti penting lain pembentukan NU sebagai sebuah organisasi adalah berkaitan dengan wawasan kebangsaan yang selalu dijadikan sebagai salah satu dasar perjuangannya selama ini. Wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh NU tersebut dapat

dilihat pada setiap langkah dan kebijakan NU sejak dulu hingga sekarang yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Perjuangan NU ini berkobar terus mulai sejak penjajahan Belanda menyerbu Indonesia sampai penjajahan Jepang. Menurut Hakim dkk (2003: 77) bahwa:

“Walaupun pada masa penjajahan Jepang, NU memilih sikap lunak dan diplomatis, namun kelunakan NU ini tetap bertujuan untuk merebut kemerdekaan RI, kelunakan ini bertujuan untuk menarik simpati ke Jepang agar NU dapat membentuk gerakan-gerakan perjuangan kemerdekaan dengan cara memanfaatkan isu kolaborasi dengan pemerintahan Jepang. Gerakan NU pada masa Jepang tergabung dalam gerakan-gerakan yang dibuat oleh penjajah Jepang diantaranya: Pertama, TIGA A, gerakan Tiga A ini mempunyai semboyan: Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Dipimpin oleh Syamsuddin SH. Tahun 1943, dibubarkan karena tidak mendapat simpati dari rakyat dan diganti Putera. Kedua, gerakan PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat), Putera dibentuk tahun 1943 dipimpin oleh empat serangkai yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansyur. Tujuan dibentuk Putera yaitu untuk membantu Jepang dalam setiap perang yang dilakukannya. Tetapi Organisasi Putera merupakan bumerang bagi Jepang sebab anggota Putera memiliki nasionalisme yang tinggi. Ketiga, Gerakan PETA (Pembela Tanah Air), Peta merupakan organisasi bentukan Jepang yang terdiri dari pemuda Indonesia. Organisasi ini disebut pula Giyugun. Mereka mendapat latihan militer dari Jepang. Tujuannya untuk memenuhi kepentingan peperangan Jepang di Lautan Pasifik”.



KARAWANG

Oleh karena tujuan NU membentuk sebuah perkumpulan adalah untuk membentuk organisasi perjuangan yang senantiasa menentang segala bentuk penjajahan untuk merebut kemerdekaan dan sekaligus menjaga kesatuan negara Republik Indonesia dalam wadah NKRI. KH. Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama 1950-1952 memberikan keterangan dan jawaban tentang eksistensi Kementerian dan Departemen Agama di tengah bangsa dan negara Indonesia. Keterangannya untuk memberikan jawaban kepada sebagian orang yang berkeinginan menghapuskan Departemen Agama. Menurut Suryanegara (2016: 339-340) bahwa:

“KH. Wahid Hasyim menandakan bahwa Pemerintah RI merasa berkewajiban melayani keperluan masyarakat tentang agama atas dasar Pancasila. Ditegaskan adanya upaya pemisahan agama dan negara hanya terdapat secara teori dan tidak penuh dipraktikkan sepenuhnya di negara mana pun, kecuali negara atheis.

Selanjutnya diingatkan, walaupun Departemen Agama dapat saja dihapuskan dan berbagai fungsi departemen itu dilaksanakan oleh berbagai departemen lain, KH. Wahid Hasyim tegaskan bahwa penghapusannya akan menyinggung perasaan umat Islam Indonesia.

Mengenai tuduhan bahwa departemen memberikan perhatian lebih banyak pada Islam, Menteri KH. Wahid Hasyim mengingatkan bahwa jumlah penganut Islam berlipat ganda dari yang bukan Islam sehingga kesan seperti yang dituduhkan itu mungkin timbul. Namun, beban kerja untuk melayani umat Islam karena jumlahnya itu, tidak dapat disamakan dengan beban kerja bagi umat lainnya. Ini bukanlah bersandar pada diskriminasi”.

Pernyataan KH. Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama itu karena pada zamannya terdapat upaya deislamisasi kabinet sebagai kelanjutan setelah berhasil menghapuskan tujuh kata pada Piagam Jakarta; Departemen Agama pun perlu ditiadakan. Menurut Suryanegara (2016: 340) bahwa:

“Upaya pemisahan agama dan negara dari kalangan sekuler dan orang Islam sendiri seperti Nj. Rasoena Said, akan selalu bangkit lagi pada setiap zaman. Peringatan yang ditinggalkan KH. Wahid Hasyim perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak yang akan memahami realitas eksistensi umat Islam Indonesia sebagai mayoritas bangsa Indonesia, serta partisipasi aktif perjuangan Ulama dan Santri dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dari latar belakang di atas penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui kontribusi Nahdlatul Ulama (NU) dalam memperjuangkan kemerdekaan dan

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Resolusi Jihad yang dikumandangkan KH. Hasyim Asy'ari untuk melawan penjajahan.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dalam konteks mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan sehingga dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa dasar perjuangan Nahdlatul Ulama (NU) dalam mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia.
2. Bagaimana peran Nahdlatul Ulama dalam mewujudkan kemerdekaan NKRI.
3. Apa bentuk kontribusi Nahdlatul Ulama dalam mempertahankan NKRI.

C. Pembatasan Masalah

Dari latar belakang ini, maka peneliti ingin membahas tentang kontribusi NU dalam perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia dan kontribusi NU dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) dasar perjuangan NU dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia, 2) peran NU dalam mewujudkan kemerdekaan negara kesatuan republik Indonesia 3) Bentuk kontribusi NU dalam mempertahankan kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini tidak melebar, maka dari itu penulisannya akan di fokuskan pada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Karawang. Maka dari itu pertanyaan yang akan digali dalam proposal penelitian ini adalah:

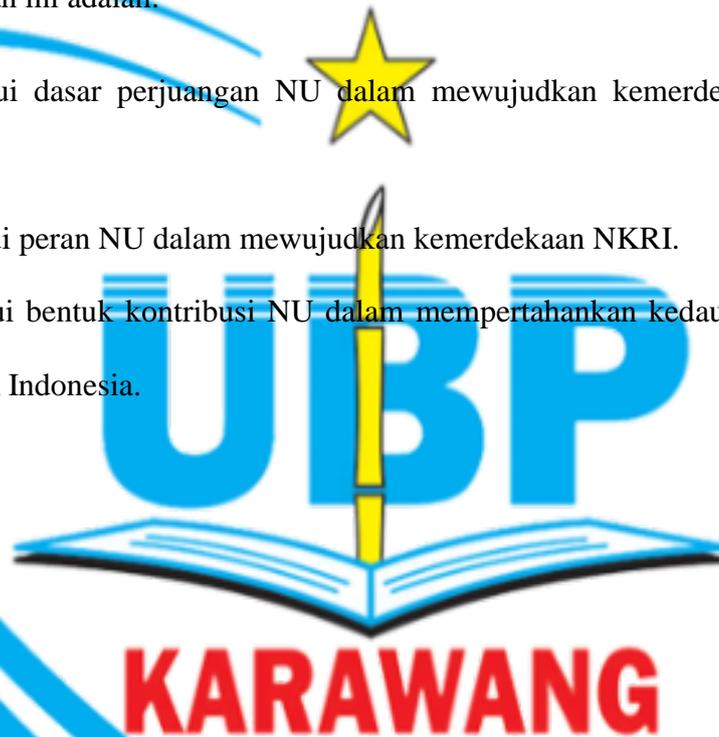
1. Apa dasar perjuangan NU dalam mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia?

2. Bagaimana peran ulama NU dalam mewujudkan kemerdekaan negara kesatuan republik Indonesia?
3. Apa bentuk kontribusi NU dalam mempertahankan kedaulatan NKRI?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar perjuangan NU dalam mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran NU dalam mewujudkan kemerdekaan NKRI.
3. Untuk mengetahui bentuk kontribusi NU dalam mempertahankan kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia.



F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teori

Dapat mengetahui dasar perjuangan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Mewujudkan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam Mewujudkan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Kontribusi Nahdlatul Ulama (NU) dalam Mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Hasil Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Donohudan, Boyolali Jawa Tengah. Menjaga Kedaulatan sebuah Negara merupakan salah satu Kewajiban bagi seluruh Nahdliyin.

2. Manfaat Praktis

Bagi Fakultas, diharapkan memberi sumbangan kepustakaan dalam pengembangan wacana civitas akademika di Program Studi (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan Karawang.

